

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO

*“Dinamika Collaborative Governance
Dalam Penanggulangan Stunting
Ditengah Pandemi Covid-19”*

VIRTUAL ZOOM,
25 AGUSTUS 2021

Latar Belakang

Laporan dari *WHO-United Nations Children's Emergency Fund (2017)*, menyebut terdapat 150,8 juta balita atau sekitar 22,2 persen balita stunting.

Indonesia >>> ditahun 2017 berada pada tren tertinggi di Asia Tenggara pada 2017. rata-rata prevalensi balita stunting mencapai 36,4 persen (8,8 juta jiwa)

Provinsi Jawa Timur berada diatas standar nasional yakni 26,91 persen kasus stunting. (kemenkes, 2018).

Dampak ganda dari persoalan stunting

Data BPS Jawa Timur (maret 2020), penduduk miskin mencapai 4.419,10 ribu jiwa atau 11,09 persen dari jumlah penduduk. Meningkat 363 ribu dari kondisi September 2019. Persentasi kemiskinan perkotaan (7,89%) dan pedesaan (14,77%).

Dampak dari kegagalan pemerintah dalam mencegah stunting akan membuat ekonomi terpuruk sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto.(Bappenas, 2018). Bank Dunia memperkirakan pada 2016, jika PDB Indonesia sebesar 13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian mencapai angka 260-390 triliun rupiah/tahun

Fokus Pemerintah

1. Stunting >>> menjadi pengalaman buruk di Jawa Timur di tahun 2013, 3 dari 10 anak kekurangan gizi dan nutrisi.
2. Covid-19 >>> Lonjakan kasus mingguan tertinggi ketiga sebesar 42% dengan (1.756), setelah DKI Jakarta (13.022), dan Jawa Barat (6.449). (Kompas.com, 24 Juni 2021).
3. Pemerintah punya prioritas jangka pendek penanganan covid-19 dan stunting bagian dari program jangka panjang yang harus diselesaikan.
4. Bagaimana dinamika collaborative governance yang dilakukan berbagai pihak terhadap penanggulangan stunting di tengah covid-19 di Jawa Timur?

Kebijakan Pemerintah

UU

- UU No. 36 / 2009 tentang kesehatan

Inpres

- Intruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat hidup sehat

Kajian Stunting Beberapa Daerah di Jawa Timur

1. Determinasi angka stunting di Jawa Timur menunjukkan balita yang tinggal di daerah perkotaan lebih memiliki risiko rentan terkena stunting dibandingkan di pedesaan. (Agung, 2020).
2. Kabupaten Jember = penyebab stunting di wilayah pedesaan dan perkotaan bukan hanya ketimpangan pendidikan tetapi pada pendapatan keluarga, pemberian ASI eksklusif, dan suplemen lainnya. (Farah, 2015).
3. Kota Surabaya = adanya hubungan antara panjang badan lahir balita, riwayat ASI eksklusif, kemampuan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan ibu dan pengetahuan gizi. (Ni'mah (2015).

Tinjauan Pustaka

Pendapat ahli tentang collaborative governance (CG)

1. *Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012)*, CG adalah proses politik dalam pengambilan kebijakan pemerintah dengan mencakup berbagai unsur stakeholder.
2. *McGuire (2006)*, Pemerintah dengan segala upayanya tidak bisa mengatasi semua persoalan, perlu keterlibatan banyak pihak untuk membantu merencanakan dan memberikan otoritas penuh.
3. *Donahue (dalam Sudarmo, 2011)*, menyebut ada tiga aspek penting dalam kolaborasi, yakni aktor, komitmen dan keterbukaan.
4. *Islamy (2018)*, CG diartikan sebagai sebuah keseimbangan antara sumberdaya maupun kewenangan antar para pihak dan melakukan intervensi kepada kelompok yang memiliki keterbatasan.
5. *Innes, J. E., & Booher (2000)*, dalam kolaborasi tahapan dialog harus dikedepankan secara efektif dan substantif. Setiap pihak memiliki legitimasi dan membangun hubungan dan saling percaya.

Metodologi

- Deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Lokasi Penelitian berada di Provinsi Jawa Timur yang secara objektif merupakan daerah dengan tingkat stunting masih tinggi.
- sumber data utamanya dari berbagai artikel dan jurnal, buku-buku, undang-undang dan kebijakan lain berkenaan dengan stunting. Data pendukung berasal dari artikel berbagai program yang dilakukan pemerintah daerah Jawa Timur dan para mitra pembangunan.
- Teknik analisis menggunakan model Hubermas (2014), yakni kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil

1. Terdapat 12 stakeholder/lebih yang terdiri dari pemerintah dan organisasi masyarakat, namun jumlah tersebut masih minim. swasta dan media kurang terlibat.
2. Rembuk Stunting sebagai ruang dialog para aktor untuk membangun perspektif dan komitmen, namun terdapat keterbatasan baik secara intensitas dan partisipasi publik.
3. Kesenjangan sumberdaya antara pemerintah daerah sebagai aktor dengan organisasi masyarakat. Ide dan gagasan kurang Nampak. Malah ketergantungan, dan kurangnya akses keterbukaan publik kepercayaan jadi lemah.
4. Seharusnya komitmen yang muncul, namun dinamika berjalan masing-masing. Pemerintah masih bersifat sentralistik.
5. Keterbatasan pengetahuan pada intervensi spesifik dan sensitif. Menimbulkan persoalan teknis.
6. Kurangnya dukungan kebijakan seperti aturan hukum yang lebih mengikat akan tanggungjawab penanggulangan stunting secara konvergensi.

Diskusi-1

1. *Prosedur dan kesepakatan institusi*, adalah adanya komitmen dalam teks dan struktural seperti terbentuknya kelompok kerja penanggulangan stunting. Forum rembuk stunting yang diselenggarakan adalah proses berbagi pengetahuan dan membangun komitmen bersama. Komitmen struktural sendiri terlihat peran dominan pemerintah sehingga stakeholder diluar pemerintah tidak mendapat akses yang luas sehingga terjadi perbedaan pandangan dan sulit membangun kepercayaan.

2. *Kepemimpinan*, sangat besar perannya dalam mencari dukungan sumber daya, menginisiasi pertemuan formal dan non-formal. Setiap program intervensi ada pelaksana dan penanggungjawab, dan saling terhubung pada agenda prioritas dan diluar prioritas. Mendorong advokasi publik, untuk mengembangkan ide, gagasan dan visi kedepan secara bersama.

3. *Pengetahuan*, tiap unit organisasi memiliki pemahaman yang berbeda, namun tidak justru menghambat. Komitmen secara struktural terlihat dari keterlibatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi berdasarkan program yang dijalankan dalam intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya ruang dialog akan menyebabkan terhambatnya kerja dari insitusi.

4. *Sumber daya* , berupa pembiayaan, waktu, dukungan teknis dan administratif, pendampingan, dan dukungan tenaga ahli. Sumber daya masih dominan terletak pada pemerintah sebagai titik sentral. Tugas pemerintahlah mengawal inisiatif dan menggalang agenda partisipasi publik. Keterbatasan sumber daya dari organisasi masyarakat berdampak pada lemahnya jangkauan kepada wilayah sasaran program dan menyebabkan ketergantungan kepada pemerintah.

Kesimpulan & Rekomendasi

1. Terjadi kesenjangan dalam kolaborasi yakni kesepakatan institusi ditandai masih sebatas komitmen bersama tanpa di elaborasi secara mendalam keberpihakan dan capaian kinerjanya.
2. Lemahnya kepemimpinan dalam menciptakan ide, gagasan dan inovasi pengambilan kebijakan dan kurang mengakomodir dukungan sumberdaya dari luar seperti swasta, media, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.
3. Terbatasnya pengetahuan karena perbedaan perspektif menyebabkan lemahnya komitmen. Sehingga kepercayaan publik menjadi berkurang.
4. masih sangat minim dan lemah peran stakeholder. Ketidakmampuan Pemerintah dalam menampung beragam kepentingan.
5. Pemerintah harus melakukan penyempurnaan kebijakan/aturan hukum yang jelas. Meningkatkan peran pihak terkait dalam merefokusing sumberdaya. Forum rembuk harus diperluas dan menyasar kelompok masyarakat yang fokus pada pemberdayaan.

Profil

Ahmad Saufi, Alumni Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro. Aktif dilembaga Pemberdayaan Masyarakat yakni LPM Equator. Publikasi terakhir berjudul *"Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19"*, diterbitkan Jurnal of Character Education Society tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Tahun 2020, ikut terlibat mengawali terbentuknya Indonesian Journal of Business Economics and Management (IJBEM) sebagai editor. Prestasi selama covid-19 adalah terpilih sebagai opini terbaik yang berjudul *"Covid-19 dan Potret Pertanian Kita"* <https://inisiator.com/covid-19-dan-potret-pertanian-kita/>. Kontak surel di saufikayong2@gmail.com atau WA 0812-2749-9491.

